

PENDEKATAN SOSIAL DAN PENDEKATAN POWER DALAM MEWUJUDKAN KOTA ADIPURA

Oleh:

Rosni

ABSTRAK

Untuk meraih penghargaan Adipura bagi suatu kota pada hakikatnya memerlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Aparatur pemerintah, yakni Bupati/Walikota, instansi/bedan/dinas lingkungan hidup, dinas yang ada hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, dan masyarakat harus mempunyai komitmen bersama untuk meraih Adipura bagi kotanya. Dalam rangka membangun komitmen bersama, paling tidak ada 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan sosial dan pendekatan power yang perlu dilakukan di lapangan. Keduanya diaplikasikan secara terpisah maupun terpadu pada usaha dan upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di ibu kota kabupaten/kota.

Kata kunci: Pendekatan sosial dan pendekatan power untuk suatu Adipura.

A. Pendahuluan

Penghargaan pemerintah pusat kepada kota yang bersih, teduh, dan hijau disebut Adipura. Pemerintah kabupaten/kota sangat mendambakan penghargaan itu sebagai ukuran (tolak ukur) prestasinya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Pencapaian prestasi ini sekaligus sebagai "prestise" khususnya bagi Bupati/Walikota sebagai kepala daerah, dan umumnya kepada masyarakat kota.

Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup pada dekade ini sudah selayaknya menjadi kepedulian dan partisipasi semua pihak, baik bagi yang mempunyai kedudukan/jabatan di pemerintahan maupun bagi masyarakat sebagai rakyat biasa. Kepedulian dan

partisipasi dimakud karena mengingat kompleksnya permasalahan lingkungan hidup itu. Masalah lingkungan hidup pada hakikatnya meliputi pengrusakan, pencemaran, dan dampak lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup. Banjir yang melanda kota Jakarta pada bulan Pebruari 2007, banjir yang terjadi bulan Januari 2007 disebagian kabupaten (Langkat, Asahan, dan Deli Serdang) di daerah Sumatera Utara, juga banjir yang melanda sebagian besar Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) pada bulan Januari 2007, peristiwa-peristiwa ini hanya sebagian dari contoh, bahwa kondisi lingkungan hidup kita sudah bermesalah sebagai akibat (dampak) dari pengrusakan hutan. Di pihak lain,

permasalahan sampah yang terjadi di hampir setiap kota di Indonesia, pemanasan global, dan punahnya beberapa jenis *species* di permukaan bumi, juga merupakan bukti bahwa lingkungan hidup sudah bermasalah, sebagai akibat dari pencemaran dan dampak lingkungan hidup.

Menyadari dan mensikapi permasalahan di atas, sehingga Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia melakukan usaha dan mengintensifkan penanganan kebersihan kota, dan memotivasi pemerintah daerah, sehingga kabupaten/kota dapat meraih penghargaan Adipura bagi kotanya. Sebagai suatu prestasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan hijau di daerahnya. Menurut Rahmad Witoelar (2005) penanganan kebersihan kota sebagai suatu yang sangat mendesak, dan bagi pemerintah daerah yang kurang bagus nilai kebersihannya, maka pemerintah memberikan sanksi akan mengumumkannya kepada masyarakat luas. Adipura merupakan penghargaan yang harus diraih oleh Bupati/Walikota, agar daerahnya tidak diumumkan sebagai daerah/kota yang kotor oleh pemerintah.

Untuk mencapai penghargaan Adipura maka pemerintah kabupaten/kota hendaknya bersatu padu dan bekerja sama dengan masyarakat untuk membuat kotanya menjadi *bersih* dari sampah, menanam pohon peneduh yang rindang sehingga lingkungan hidup menjadi *teduh*, dan melakukan penghijauan dengan menanam bunga pada pot bunga dan menanam pohon

seperlunya sehingga kawasan tersebut menjadi *hijau*. Usaha dan upaya ini dapat diwujudkan apabila apratur pemerintah mulai dari yang tertinggi Bupati/Walikota sampai dengan Lurah/Kepala Desa secara bersama-sama dengan masyarakat membentuk suatu komitmen bersama, untuk menjadikan kotanya sebagai kota Adipura. Menurut UU No. 32/2004, pengendalian lingkungan hidup berakata kabupaten/kota merupakan kewenangan kabupaten/kota. Kemudian, kewenangan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup adalah meliputi usaha perencanaan, pelestarian, dan pengendalian lingkungan hidup.

Berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan kita pada saat ini, dan sesuai dengan analisa situasi dan kondisi sosial budayanya, serta sistem birokratisasi (*masih belum secara murni melakukan debirokratisasi*) yang berjalan, menurut hemat kami, bahwa pendekatan sosial dan pendekatan power kiranya masih relatif relevan diaplikasikan, dalam rangka pembangunan budaya bersih, teduh, dan hijau bagi masyarakatnya.

Sebelum mengaplikasikan kedua pendekatan di atas, kiranya perlu disadari bahwa target utama pembangunan yang dimaksudkan adalah Adipura bagi kota kita. Kemudian, dalam rangka pencapaian target itu hendaknya secara implisit terlaksana pembangunan kebudayaan masyarakat, dalam arti pembangunan budaya dimana masyarakatnya "ingin dan butuh" hidup di lingkungan yang bersih, teduh, dan hijau.

Meraih Adipura mungkin dapat dicapai melalui usaha dan kerja keras,

namun bagaimana membuat budaya bersih, teduh, dan hijau menjadi budaya masyarakat, menurut hemat kami membutuhkan waktu yang relatif lama. Namun dengan menerapkan pendekatan sosial dan pendekatan power pada program pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, pada gilirannya budaya itu dapat tumbuh dan berkembang diengah-tengah masyarakat perkotaan. Bagaimana mengaplikasikan kedua pendekatan ini dalam rangka pembangunan masyarakat perkotaan, sehingga dapat mewujudkan kota Adipura, merupakan tujuan dari penuturan tulisan ini. Analisisnya didasari oleh kajian terhadap literatur sosiologi dan kebudayaan, empiri selama hidup dan bermasyarakat di daerah perkotaan, dan juga didukung oleh hasil observasi terhadap permasalahan dan dampak dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan di perkotaan utamanya di kota Medan.

B. Pendekatan Sosial

Pendekatan Sosial adalah pendekatan yang memahami kehidupan sosial suatu masyarakat dan melihat masyarakat sebagai subjek yang berkepribadian dan berpotensi. Setiap masyarakat pada hakikatnya mempunyai adat istiadat dan norma yang berbeda karena lingkungannya juga berbeda-beda. Pada masyarakat yang dominan beragama Islam, mengucapkan salam "*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*" merupakan kebiasaan sekaligus norma dalam bertegur sapa dan ucapan yang pertama sekali diucapkan bila akan masuk bertamu ke

suatu rumah, "*Horas*" bagi masyarakat suku Batak Toba dan Angkola Sipirok, "*Mejujuah*" pada kehidupan masyarakat suku Batak Karo, "*Ya'ehowu*" dalam kehidupan masyarakat suku Nias, "*Njuahjuah*" pada kehidupan masyarakat suku Pakpak, dan sebagainya. Melakukan pendekatan sosial berarti kita terlebih dahulu masuk ke kehidupan sosial suatu masyarakat. Kepada setiap apratur sebagai petugas pembangunan masyarakat, sebelum menyampaikan ide-ide ataupun gagasan pembangunan hendaknya terlebih dahulu mengakrabkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam setiap menyapa dan bertegur sapa, ataupun mengawali setiap pembicaraan pada situasi formal dan nonformal, petugas pembangunan harus mengucapkan "*selam*" (ucapan) yang sudah biasa dan lajim dilakukan masyarakat. Pada pendekatan sosial berarti petugas pembangunan "*memasukkan diri*" ke dalam kehidupan masyarakat.

Setelah hubungan keakraban terwujud, sambil belajar, dan diakui dengan masyarakat maka petugas sudah dapat mengemukakan ide atau gagasan sehubungan dengan usaha untuk membuat lingkungan hidup mereka agar menjadi bersih, teduh, dan hijau. Menjalin keakraban ini diakui membutuhkan waktu, namun dalam pelaksanaan pendekatan sosial petugas pembangunan harus dapat mengefisienkan waktu yang tersedia. Dalam menjalin keakraban hendaknya tercipta rasa saling percaya atau tidak saling curiga, petugas pembangunan dan masyarakat hendaknya dalam hubungan sebagai

teman karib atau saudara. Pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan apabila antara petugas pembangunan dengan masyarakat menjalin keakraban, baik dalam menyampaikan ide/gagasan maupun pada pelaksanaannya.

Dalam hubungan keakraban yang sudah terwujud, petugas harus pula dapat memberikan sentuhan bagi logika berpikir masyarakat, melalui beberapa visualisasi dan contoh-contoh tentang pengrusakan, pencemaran, dan dampaknya bagi kelangsungan hidup manusia. Sentuhan logika berpikir ini muaranya adalah, adanya suatu persepsi bahwa lingkungan hidup kita sudah "sangat bermasalah" dan "mengancam" kehidupan manusia, dan harus dikendalikan dan dikelola secara bijaksana dan benar. Contoh tentang banjir di kota-kota di Indonesia, bencana tanah longsor, lingkungan hidup manusia yang banyak sampahnya, suasana tempat tinggal dan lingkungan yang gersang, kondisi tempat tinggal yang tidak teduh atau tidak ada pohon-pohonan, dan sebagainya, akan dapat menyentuh logika berpikir dan memberikan kesadaran kepada masyarakat, bahwa manusia pada hakikatnya harus hidup di daerah yang lingkungannya bersih, teduh, dan hijau.

Apratur atau petugas pembangunan yang dikirim dalam rangka pembangunan masyarakat perkotaan, sebaiknya orang yang bijak dan cukup terpelajar. Petugas tidak boleh memaksakan ide-ide atau gagasannya, walaupun secara teoritis akan menolong dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Menurut Siagian (1989)

masyarakat yang buta huruf sekalipun mempunyai kepentingan yang kuat dalam kehidupannya dan sangat rasional dalam batas pengertian dan pengalamannya. Petugas tidak boleh berpikir bahwa dia dapat langsung mendidik dan mengajari masyarakat. Orang dewasa itu telah memiliki (1) konsep diri, (2) pengalaman, (3) kesiapan untuk belajar, dan (4) orientasi terhadap belajar (Knowles, 1977). Artinya, orang dewasa telah memiliki konsep diri yang matang dan mempunyai kemauan sendiri dalam menentukan arah belajarnya, orang dewasa telah memiliki pengalaman hidup yang merupakan identitas dirinya dan harus dihargai serta dimanfaatkan dalam proses pembelajaran bagi mereka, orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar sesuai dengan perkembangan pengalaman dan peran sosial yang dimilikinya, dan kemudian, orientasi terhadap belajar orang dewasa cenderung bahwa hal-hal yang dipelajarinya itu dapat segera diaplikasikan. Ide-ide ataupun gagasan yang berhubungan dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat atau akan menyentuh logika berpikir masyarakat, hendaknya disampaikan dengan pertimbangan pemikiran ataupun asumsi pembelajaran kepada orang dewasa tersebut, masyarakat bukan untuk diajari tapi diajak berdiskusi.

Ide-ide cemerlang petugas pembangunan tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup haruslah didiskusikan secara matang bersama dengan anggota masyarakat, lalu diambil keputusan untuk dilakukan dan

diterapkan secara bersama pula. Sedangkan untuk pengadaan pohon, bunga, dan pot bunga adalah menjadi tanggung jawab petugas pembangunan, sebab dengan kondisi perkenomian saat ini tidak mungkin lagi membebani masyarakat. Penanaman dan pendistribusian bahan dan pohon sebaiknya dikerjakan secara bersama, ataupun diawali sendiri oleh petugas pembangunan untuk kemudian dilanjutkan oleh masyarakat yang dilakukannya dengan bergotong-royong. Jadi jelas kelihatan bahwa petugas pembangunan hanya sebagai agen pembaharuan saja, sedangkan masyarakat melanjutkan hal-hal yang baru tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sudah seharusnya terwujud. Kemudian, tidak tertutup kemungkinan adanya sumbangan dari anggota masyarakat yang tingkat sosial ekonominya sudah tinggi (diatas rata-rata anggota masyarakat secara umum) untuk menyediakan bahan dan pohon, kemungkinan kedua ini jelas lebih baik karena rasa memiliki masyarakat terhadap bahan dan pohon itu akan tinggi nantinya.

Dalam situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya masyarakat enggan diajak bergotong-royong, ataupun hadir berdiskusi dalam rangka pengambilan keputusan bagi kegiatan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, walaupun petugas sudah mengatur dan menggunakan waktu untuk itu diluar waktu kegiatan rutusnya. Maka petugas harus meminta bantuan kepada pimpinan formal dan informal yang ada di masyarakat agar

dapat menggerakkan masyarakat (gerakan massa) bagi kepentingan dimaksud.

Pada waktu menjalankan peran sebagai petugas pembangunan, petugas jangan beranggapan bahwa ia merupakan orang penting dan hebat sehingga harus dihormati oleh masyarakat. Menurut Siagian (1989) petugas pembangunan perlu mengerti bahwa dalam melaksanakan tugasnya dia "bekerja dengan" dan bukan "bekerja diantara" masyarakat. Jika menganggap bekerja diantara masyarakat, maka tekanan utamanya adalah perannya, perbuatannya, dan tujuannya. Sikap seperti ini dapat menjerumuskan pada tindakan yang keliru, dimana lebih mengutamakan kerjanya, dan dapat mendorong untuk merasa sebagai orang penting dan hebat tadi. Petugas harus menanamkan dalam dirinya bahwa dia bertugas dan "bekerja dengan" masyarakat. Konsep bekerja dengan masyarakat membawa implikasi bahwa petugas tidak akan memaksakan kehendaknya, melainkan dia bersama dengan masyarakat melakukan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup supaya lingkungan hidup masyarakat dapat menjadi lebih bersih, teduh, dan hijau, kualitasnya menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Pelaksanaan pendekatan sosial dalam rangka pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk mendekati masyarakat, sehingga mereka bersedia untuk ikut serta dalam kegiatan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan sosial

juga memberikan isyarat bahwa petugas pembangunan bekerja sama dengan orang lain/masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Apabila kita ingin bekerja sama dengan orang lain maka haruslah atas dasar saling pengertian, tanpa keadaran saling pengertian, hasil yang diharapkan tidak akan mungkin tercapai. Dalam mendekati masyarakat, agar masyarakat dapat bekerja dan program dapat berjalan dengan baik, maka masyarakat haruslah diperlakukan sebagai subjek yang berkepribadian dan berpotensi.

C. Pendekatan Power

Pendekatan Power adalah pendekatan yang menhandalkan kekuasaan dan wewenang dalam rangka pelaksanaan suatu program ataupun penyampaian ide/gagasan kepada masyarakat. Sebelum analisa lebih lanjut bagaimana penerapan Pendekatan Power bagi suatu ide/gagasan dalam rangka pembangunan masyarakat perkotaan, maka hal-hal berikut seperti: stratifikasi sosial, ketidaksamaan (*inequality*), dan kekuasaan dan wewenang, menurut hemat kami harus terlebih dahulu dipahami oleh setiap petugas pembangunan.

Dalam kehidupan masyarakat ada yang disebut lapisan-lapisan sosial atau dalam konsep sosiologi disebut stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan kedudukan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (*hierarchis*) (Sorokin, 1954) dalam (Soekanto, 1990). Lapisan-lapisan ini mempunyai kedudukan yang bertingkat dari bawah ke atas. Barang

siapa yang memiliki sesuatu yang berharga (harta, jabatan, dan pangkat) dalam jumlah yang relatif banyak maka dianggap oleh masyarakat mereka itu berkedudukan pada lapisan atas. Biasanya, golongan yang berada dalam "lapisan atas" itu tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat *kumulatif*, artinya mereka yang memiliki uang yang banyak dan berpangkat, misalnya, akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan, dan mungkin juga kehormatan, sedangkan mereka yang mempunyai kekuasaan yang besar akan mudah menjadi kaya dan mudah mengusehakan suatu ilmu pengetahuan yang diperlukannya.

Bentuk lapisan sosial yang lain, yang menimbulkan adanya kedudukan seseorang dalam masyarakat, diperolehnya karena kelahiran. Menurut Linton (1956) dalam Sajogyo (1985) kedudukan ini dikenal sebagai "*ascribed status*" yaitu suatu kedudukan dalam masyarakat yang diperoleh seseorang karena kelahiran. Kedudukan yang diperoleh berdasarkan faktor keturunan, misalnya, seseorang anak yang lahir dari keturunan bangsawan maka anak itu sekaligus bangsawan pula.

Dalam kehidupan masyarakat, baik pada masyarakat primitif maupun masyarakat yang kompleks (masyarakat agraris, industrialis, kapitalis, demokratis dan sebagainya), ada aspek yang disebut dengan "ketidaksamaan" (*inequality*) dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat. Gejala ketidaksamaan ini dapat memperjelas

kita untuk memahami struktur sosial dalam suatu masyarakat (Bettlelille, 1977) dalam (Sajogyo, 1985). Kemudian, dengan menormasi ketidaksamaan maka kita dapat melihat dan menganalisa pembagian masyarakat berdasarkan kelas, grup, dan strata. Juga analisa mengenai pola tindakan orang-orang yang terbagi pada kelas dan strata itu dalam berbagai situasi dan kondisi.

Menurut Bettlelille (1977) dalam Sajogyo (1985) sumber dari ketidaksamaan itu antara lain status dan organisasi atau pengorganisasian, keduanya dapat memberi posisi kekuasaan ataupun wewenang kepada seseorang dalam masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki seseorang cenderung tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, dengan perkataan lain, antara yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu secara rela ataupun karena dipaksa. Biasanya, jika kekuasaan itu dijumpai pada diri seseorang, maka orang itu disebut "pemimpin" dan mereka yang menerima pengaruh adalah pengikut-pengikutnya. Dan, jika kekuasaan itu ada pada seseorang atau sekelompok orang, dan mendapat dukungan dan pengakuan dari masyarakat, maka kekuasaan itu menjadi "wewenang". Wewenang hanya dapat efektif bila didukung dengan kekuasaan yang nyata. Misalnya, polisi atau tentara, yang diakui masyarakat sebagai aparat yang memiliki wewenang dalam bidang keamanan dan ketertiban, sehingga dengan adanya pengakuan itu maka

polisi dan tentara memiliki kekuasaan dalam rangka pengamanan dan penertiban manusia, misalnya terhadap seseorang yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa stratifikasi sosial, ketidaksamaan, dan kekuasaan dan wewenang yang ada dalam kehidupan masyarakat, berarti baik pada masyarakat agraris di pedesaan ataupun masyarakat yang kompleks di perkotaan, dijumpai adanya penguasa keuangan (orang kaya), penguasa birokrasi (kepala administrasi pemerintahan seperti lurah, camat, bupati/walikota dan sebagainya), penguasa keamanan dan ketertiban (polisi dan tentara), penguasa swasta atau industri (direktur atau manajer), dan sebagainya. Mereka-mereka ini pada hakikatnya memiliki kekuasaan dan wewenang sesuai dengan pengakuan dari masyarakat kepadanya. Disamping itu, orang-orang yang memiliki kekuasaan di masyarakat ada juga yang disebut dengan orang yang berpangkat, berharta, berkuasa, berkedudukan, bangsawan dan sebagainya, mereka ini juga memiliki kekuasaan sesuai dengan aspek atau bidang yang melekat dengan dirinya.

Sehubungan dengan penerapan Pendekatan Power pada program pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di perkotaan, bahwa Bupati/Walikota sebagai orang yang memiliki kedudukan tertinggi dan berkuasa, harus membangun komitmen bersama dengan mereka yang memiliki kekuasaan dan wewenang di masyarakat. Mereka yang memiliki kekuasaan dan wewenang tersebut

diajak secara bersama untuk melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya, dalam menanam pohon peneduh di sepanjang pinggir jalan pada daerah permukiman dan pertokoan, dilakukan secara bergotong royong oleh polisi, tentara, lurah, camat, dan yang memiliki kekuasaan dan wewenang lainnya. Polisi dan tentara dianjurkan untuk memakai pakaian dinasnya (sejenisnya) pada kegiatan tadi. Pohon yang telah ditanam tersebut pada saatnya akan dijaga oleh masyarakat, sebab mereka akan merasa bersalah (takut) bila tidak menjaga ataupun merusak pohon yang telah ditanam oleh apratur polisi dan tentara itu.

Pada situasi dan kondisi tertentu Bupati/Walikota juga dapat menggerakkan mereka yang memiliki kekuasaan dan wewenang tadi untuk memberikan sumbangan pot, bunga, dan pohon untuk ditanam dan didistribusikan di daerah pertokoan, sekolah, perkantoran, pasar, puskesmas atau rumah sakit, dan sebagainya. Artinya, dengan pendekatan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh Bupati/Walikota, sehingga mereka yang berharta dan berkuasa dapat memberikan sumbangannya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Pada hal-hal tertentu, apabila masyarakat awam belum mau berpartisipasi dan peduli terhadap program ini, maka polisi dan tentara lah yang kembali melakukan penanaman dan pendistribusian pot dan bunga dimakaud, dalam arti polisi dan tentara itu secara tidak langsung menitikkan kepada masyarakat untuk menjaga pot, bunga, dan pohon itu, dan

apabila muncul "permasalahan" sehubungan dengan keberadaan pot, bunga, dan pohon tadi, maka individu yang bersangkutan akan berhubungan dengan aparat keamanan dan ketertiban.

D. Penutup

Mengaplikasikan pendekatan sosial dan pendekatan power dalam rangka program pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di perkotaan, dapat diterapkan secara sendiri-sendiri, ataupun secara terpadu. Melalui pendekatan sosial implikasinya adalah adanya partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Dengan pendekatan power maka masyarakat akan merasa "takut" untuk tidak menjaga setiap pohon, bunga, dan pot bunga yang telah ditanam dan didistribusikan oleh apratur yang memiliki kekuasaan dan wewenang, dan setelah merasakan dampak positif dari upaya yang dilakukan apratur tersebut, masyarakat akan ikut pula mengelola lingkungan. Artinya pembudayaan diawali dengan cara paksaan untuk tujuan terwujudnya kesadaran, yang pada gilirannya akan memberikan kesadaran bagi masyarakat.

Apabila dengan pendekatan sosial (dirasakan) mengalami hambatan di lapangan, yang secara khusus masalah itu datang dari warga masyarakat, misalnya adanya tindakan masyarakat yang tidak mendukung pengelolaan lingkungan, maka petugas pembangunan harus melakukan pendekatan power secara bersamaan, kedua pendekatan dilakukan secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA:

- Departemen Dalam Negeri. (2004). *Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2006). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, No. 14 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura*. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.
- Knowles, Malcolm S. (1977). *The Modern Practice of Adult Education - Andragogy versus Pedagogy*. New York: Association Press.
- Sajogyo, Pudjiwati. (1985). *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Fakultas Paaca Sarjana IKIP Jakarta bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Siegian, H. (1969). *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi - Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- "Suara Bumi". (2005). Edisi November - Desember 2005. Pekanbaru: Asisten Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Urusan Wilayah Sumatera, PPLH Regional Sumatera.